



Formatted: Font: 12 pt

Ombudsman Republik Indonesia

Formatted: Font: 11 pt

Laporan Triwulan II 2011

Ombudsman Republik Indonesia

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 26 pt, Font color: Accent 1

Formatted: Left

Formatted: Font: +Headings (Cambria), Font color: Accent 1

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 26 pt, Font color: Accent 1

I. Pendahuluan

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 14 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Space After: 10 pt

Sejak Januari hingga Juni 2011 Ombudsman Republik Indonesia telah menerima sebanyak 2096 akses masyarakat melalui surat, datang langsung, telepon, fax, e-mail, website, dan sebagainya. Akses tersebut dapat berupa penyampaian laporan/pengaduan, pertanyaan seputar Ombudsman, konsultasi, dan sebagainya. Dari jumlah tersebut, 1292 diantaranya telah diselesaikan pada saat itu juga, sementara sejumlah 804 akses sisanya ditindaklanjuti secara formal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Ada beberapa investigasi laporan/pengaduan masyarakat serta investigasi atas prakarsa sendiri (*own-motion investigation*) yang menjadi prioritas untuk diselesaikan sejak pergantian Anggota Ombudsman periode 2011-2016. Investigasi tersebut adalah laporan tentang pembunuhan orang tua salah satu Asisten Ombudsman terkait kasus *trafficking*, pelayanan oleh penyelenggara pelabuhan Merak-Bakauheni, pelayanan pendidikan di Kabupaten Bogor, pelayanan terpadu satu pintu oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, pelayanan publik oleh kecamatan di DKI Jakarta, pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Probolinggo Jawa Timur, pelayanan pertanahan di Kota Palangkaraya, penyimpangan dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah, penyimpangan dana pengadaan alat-alat pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Malang.

II. Kinerja Penanganan Laporan

A. Pencegahan

1. Sosialisasi

Ombudsman telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait tugas, fungsi, dan wewenang dalam bentuk diskusi publik, diskusi interaktif, seminar, ceramah, kuliah umum, pertemuan dengan kelompok masyarakat, kunjungan ke berbagai media, dan sebagainya. Dalam beberapa kegiatan, Ombudsman juga membuka klinik pengaduan masyarakat secara gratis untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan Ombudsman di daerah, khususnya yang belum terdapat kantor perwakilan Ombudsman.

Dalam rangka penyebarluasan informasi pada triwulan II ini Ombudsman RI mengadakan sosialisasi dan klinik pengaduan di 6 (enam) wilayah yaitu Kabupaten Pandeglang (Banten), Kota Cirebon (Jawa Barat), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Pekanbaru (Riau), Kota Ternate (Maluku Utara) dan Kota Palu (Sulawesi Tengah).

Disamping keenam wilayah tersebut sosialisasi juga dilaksanakan di jajaran Pemerintah Kota Malang, kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Harian jawa Pos dan LSM Fitra di Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Walikota/Bupati serta SKPD setempat yang intinya adalah menyebarkan informasi mengenai keberadaan Ombudsman sebagai salah satu Lembaga Negara yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .

Pada kesempatan tersebut juga diadakan klinik Ombudsman untuk menerima pengaduan masyarakat dan konsultasi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah yang bersangkutan.

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai kedudukan, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Memberikan kesadaran kepada publik bahwa mereka dilayani oleh birokrasi pemerintahan dan instansi pelayan publik lainnya;
3. Mendorong institusi penyelenggara pelayan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran sebagai pelayan masyarakat.
4. Mengetahui permasalahan pelayanan publik di propinsi setempat serta kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 14 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 13 pt

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Left, Indent: First line: 0 cm

Formatted: Font: 11 pt

5. Memberikan saran perbaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik atau Pemerintah Provinsi sebagai tindak lanjut dari penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman secara langsung.

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain :

1. Publikasi di media cetak dan elektronik, menyebarkan brosur, leaflet serta pemasangan spanduk-spanduk dalam rangka pemberitahuan kepada masyarakat setempat.
2. Dialog interaktif melalui RRI/radio swasta dan TVRI/ TV swasta di daerah.
3. Seminar/diskusi/sarasehan dilakukan bekerjasama dengan Universitas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta instansi Penyelenggara Pelayanan Publik di daerah dengan tema “ Peran Ombudsman Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik”
4. Kunjungan ke media cetak dan Universitas di daerah untuk menjalin kerjasama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah

Untuk menunjang kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diadakan kegiatan klinik pengaduan Ombudsman RI selama 4 (empat) hari . Pada kegiatan tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk melaporkan dan berkonsultasi mengenai permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah setempat.

Terkait dengan penyelenggaraan klinik Ombudsman di 6 (enam) wilayah secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Klinik Ombudsman di Kota Cirebon Jawa Barat diadakan di Grage Mall, pengaduan yang diterima sebanyak 72 kasus dengan Terlapor tertinggi pertama adalah Pemerintah Daerah, kedua Polri selanjutnya BUMD, BPN dan Pengadilan Negeri.
Sementara substansi permasalahan yang dilaporkan tertinggi adalah permintaan imbalan uang khususnya dalam pengurusan KTP, KK, SIM dan proses perekrutan PNS. Selanjutnya pelayanan yang kurang baik di RS dan kesulitan dalam penggunaan Jamsostek, Askeskin yang masih diharuskan membayar obat.
2. Klinik Ombudsman di Pandeglang Banten, pengaduan yang disampaikan masyarakat antara lain :
 - Program larasita dari BPN RI tahun 2010 yang seharusnya gratis tapi masih dikenakan biaya oleh Kantor Pertanahan Pandeglang melalui Kantor Kelurahan setempat, karena ketidak-mampuan masyarakat sehingga masyarakat belum menerima sertifikat sampai saat ini
 - Penggunaan dana BOS yang tidak merata kepada semua siswa
 - Program Jamkesmas yang tidak sampai kesasaran yaitu masyarakat miskin.
 - Pemberian Kredit Usaha Rakyat dari Kementerian Usaha Kecil dan Menengah yang terkesan diskriminatif, karena hanya diberikan kepada beberapa pengusaha yang mempunyai jaringan kuat dengan BRI.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0,75 cm + Indent at: 1,39 cm

3. Klinik Ombudsman di Palu Sulawesi Tengah diadakan di Auditorium RRI Palu, laporan yang diterima sebanyak 8 laporan yang menjadi kewenangan Ombudsman antara lain:

- Terkait kinerja Polda Sulawesi Tengah dalam penanganan laporan.
- Kinerja Pengadilan Negeri Palu dan Donggala
- Palayanan BKD Makassar yang tidak memproses kepangkatan yang diajukan sementara semua persyaratan sudah dilengkapi menurut Pelapor

4. Klinik Ombudsman di Pekanbaru Riau, diadakan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) bertempat di Pintu Utama Gedung Fakultas Hukum, dengan menugaskan 9 (Sembilan) orang mahasiswa secara bergantian untuk ikut serta dalam kegiatan klinik. Para mahasiswa tersebut dapat mengetahui secara langsung proses penyampaian laporan/pengaduan maupun konsultasi masyarakat kepada petugas Ombudsman.

—Hal ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk transfer informasi mengenai fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman kepada para mahasiswa dan diharapkan dapat menciptakan jaringan kerja untuk menyampaikan informasi tentang Ombudsman secara lebih luas. Selain dilaksanakan di gedung Fakultas Hukum UIR, pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, atas permintaan pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), klinik penerimaan pengaduan masyarakat juga dilaksanakan di sekretariat PSMTI di jalan Tuanku Tambusai No.7, Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada pukul 19.30 sampai dengan 21.30 WIB.

Selama kegiatan klinik berlangsung telah menerima 6 (enam) laporan, antara lain mengenai :

- Laporan/pengaduan mengenai terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan terkait dengan izin perusahaan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Meranti.
- Laporan/pengaduan mengenai pelayanan Kejaksaan Negeri Bengkalis terkait dengan pengembalian barang bukti berupa 18.000 M³ dan satu unit kapal motor.
- Laporan/pengaduan mengenai pelayanan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam proses permohonan sertifikasi tanah.
- Laporan/pengaduan mengenai pelayanan Kantor Kecamatan Payung Sekaki dalam pengurusan Kartu Keluarga

5. Klinik Ombudsman di Pontianak Kalimantan Barat, diselenggarakan bekerjasama dengan RSUD dr. Soedarso Pontianak. Selama 4 (empat) hari Ombudsman menerima 23 laporan dan 9 konsultasi yang intinya antara lain mengenai :

- Pelayanan di RSUD dr. Soetomo Pontianak
- Terkait permasalahan pertanahan
- Pemotongan tunjangan guru di daerah terpencil

Selain itu juga banyak masyarakat yang mendatangi klinik untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi tentang tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Jaringan Tahun 2010

No.	Tanggal	Lokasi	Kegiatan	Keterangan
1.	Januari 2011	Jakarta	Diskusi on air Green Radio (KBR68H)	Penyelenggara: Yappika
2.	10 Januari 2011	Smart FM, Banjarmasin	Wawancara seputar keberadaan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan	
3.	12 Januari 2011	RRI Banjarmasin	Acara on air "Aspirasi Merah Putih" di LPP RRI Banjarmasin yang disiarkan secara langsung dan direlay oleh beberapa stasiun RRI di daerah lain, dengan tema "Urgensi Ombudsman dalam Pelayanan Publik"	
4.	21 Januari 2011	RRI Banjarmasin	Diskusi on air tentang pengenalan kelembagaan Ombudsman "Urgensi Ombudsman dan keberadaan kantor perwakilan di Kalimantan Selatan".	
5.	23 Januari 2011	RRI Banjarmasin	Diskusi on air tentang peran Ombudsman dalam pemberantasan korupsi, sehubungan pernyataan Presiden mengenai angkat senjata pemberantasan korupsi.	
7.	10 Februari 2011	Smart FM, Banjarmasin	Diskusi on air Perkembangan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan setelah dinyatakan berdiri dan memberikan pelayanan pengaduan masyarakat.	
8.	12 Februari 2010	Duta TV, Banjarmasin	Dialog "Banua Aprisite" tentang kesalahan pengumuman kelulusan pegawai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin.	

Formatted Table

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

9.	18 Februari 2011	TVRI Kalsel	TV Talkshow acara Masyarakat Sadar Hukum dengan tema Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.	
10.	20 Februari 2011	RRI Banjarmasin	Urgensi Ombudsman dalam Pengawasan pelayanan Publik	
11.	21 Februari 2011	Hotel Grand Sahid, Jakarta	Diskusi on air Green Radio (KBR68H) dengan tema: "Ombudsman menjawab harapan publik"	Penyelenggara: MP3
12.	21-26 Maret 2011	Banjarmasin, Kalsel	Pameran Pekan Layanan Publik 2011	Kerjasama Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan dan RRI Kalimantan Selatan
13.	22 Februari 2011	Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Pembahasan laporan/pengaduan/konsultasi HAM	
14.	22 Februari 2011	PJTv (Padjadjaran TV) Bandung	TV Talkshow Sosialisasi tugas dan kewenangan Ombudsman berdasarkan UU No.37 tahun 2008	
15.	24 Februari 2011	Studio Radio Chevy FM, Bandung	Diskusi on air Sosialisasi tugas dan kewenangan Ombudsman berdasarkan UU No.37 tahun 2008	
16.	24 Februari 2011	Mahkamah Agung RI, Jakarta	Pameran dalam rangka pelaksanaan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010	
17.	8 Maret 2011	Hotel Kristal, Kupang, NTT	Seminar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (HPI) dengan tema "Membangun Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Menuju NTT	

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

			Baru”	
18.	14 Maret 2011	Kantor Perwakilan ORI Jabar	Sosialisasi tugas dan kewenangan Ombudsman berdasarkan UU No. 37 tahun 2008	
19.	15 Maret 2011	Abdi Persada FM, Banjarmasin	Diskusi on air Peran, tugas dan fungsi Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik di Kalimantan Selatan	
20.	16 Maret 2011	Universitas Padjadjaran	Sosialisasi tugas dan kewenangan Ombudsman	
20.	18 Maret 2011	Kantor Perwakilan ORI Jabar	Sosialisasi tugas dan kewenangan Ombudsman	
22.	24 Maret 2011	Radio Mara Bandung	Diskusi on air Sosialisasi tugas dan kewenangan Ombudsman	
23.	27-29 Maret 2011	Kota Ende, Kabupaten Ende	Kerja sama investigasi masalah tanah Gereja Katedral Keuskupan Agung Ende	
24.	29-30 Maret 2011	Pakpak Barat, Sumut	Ceramah mengenai Peran Ombudsman dalam terciptanya Tata Pemerintahan yang baik	Pada saat yang sama dilakukan Pembagian Brosur Leaflet tentang Ombudsman
1.25.	7 April 2011	Lhokseumawe, Aceh	Pemberian Kuliah Umum tentang Ombudsman RI pada civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Mallikussaleh	Pada saat yang sama dilakukan pembagian brosur leaflet tentang Ombudsman kepada seluruh peserta Ceramah dan penerimaan konsultasi
2.26.	7 April 2011	Jak TV, Jakarta	TV Talkshow dengan tema “Buruknya Layanan Publik”	
3.27.	8 April 2011	Lhokseumawe, Aceh	Sosialisasi Ombudsman RI kepada Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe	Pada saat yang sama dilakukan pembagian brosur leaflet kepada seluruh pegawai Kantor Walikota

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

				Lhokseumawe
4.28.	11 April 2011	Pangkalan Berandan, Sumut	Ceramah kepada Masyarakat Pangkalan Berandan tentang Peran Ombudsman RI dalam Peneguhan Hak Asasi Warga Negara	Pada saat yang sama dilakukan pembagian brosur leaflet dan penerimaan konsultasi masyarakat
5.29.	17-21 April 2011	Pandeglang Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi “Peran Ombudsman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik” • <i>Talkshow</i> televisi • <i>Talkshow</i> radio • Pertemuan dengan media, LSM, dan tokoh masyarakat • Kunjungan media 	Pada saat yang sama dilakukan Klinik Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi yang berlokasi di Radio Paranti, Pandeglang Banten.
6.30.	17-21 April 2011	Pontianak Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi “Peran Ombudsman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik” • <i>Talkshow</i> televisi • <i>Talkshow</i> radio • Pertemuan dengan media, LSM, dan tokoh masyarakat • Kunjungan media 	Pada saat yang sama dilakukan Klinik Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi yang berlokasi di RS Dr. Soedarso, Pontianak.
7.31.	17-21 April 2011	Riau Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi “Peran Ombudsman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik” • <i>Talkshow</i> televisi • <i>Talkshow</i> radio • Pertemuan dengan media, LSM, dan tokoh masyarakat • Kunjungan media 	Pada saat yang sama dilakukan Klinik Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi berlokasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8.32.	18-22 April 2011	Cirebon Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi “Peran Ombudsman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik” • <i>Talkshow</i> televisi • <i>Talkshow</i> radio 	Pada saat yang sama dilakukan Klinik Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi yang berlokasi di Grage Mal, Cirebon.

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered

Formatted: Left

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

			<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dengan media, LSM, dan tokoh masyarakat • Kunjungan media 	
9.33	26-29 April 2011	Palu, Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi “Peran Ombudsman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik” dengan jajaran Pemda Sulawesi Tengah • <i>Talkshow</i> televisi • <i>Talkshow</i> radio • Pertemuan dengan media, LSM, dan tokoh masyarakat • Kunjungan media 	Pada saat yang sama dilakukan Klinik Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi berlokasi di RRI Sulawesi Tengah.
10.34	2-6 Mei 2011	Ternate, Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi “Peran Ombudsman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik” • <i>Talkshow</i> televisi • <i>Talkshow</i> radio • Pertemuan dengan media, LSM, dan tokoh masyarakat • Kunjungan media 	Pada saat yang sama dilakukan Klinik Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi berlokasi di RRI Ternate, Maluku Utara.
11.35	4-5 Mei 2011	Kisaran, Sumut	Pemberian Ceramah kepada SKPD Pemerintahan Kabupaten Asahan, dengan tema : Peran serta Ombudsman RI dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pada saat yang sama dilakukan Penerimaan Konsultasi masyarakat, berlokasi di Aula Kantor Bupati Asahan, Sumut.
12.24	4-5 Mei 2011	Semarang, Jateng	Menghadiri dan sebagai narasumber pada Rapat Evaluasi Supervisi Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	
25	10-13 Mei 2011	Probolinggo dan Surabaya Jatim	• Melakukan kunjungan kerja ke RSUD Waluyo dan pertemuan dengan Direktur RSUD Waluyo terkait lap dari Muhammad Nazaruddin	

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered

Formatted: Left

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered

Formatted: Left

			<p>mengenai adanya pungutan liar (diluar biaya resmi) kepada pasien yang akan menjalani operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan 	
14.26.	8-9 Mei 2011 9-12 Mei 2011	Makassar, Sulsel dan Bali	<ul style="list-style-type: none"> Menghadiri dan memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Gubernur seluruh Indonesia tanggal 8 s/d 9 Mei 2011 Menghadiri konferensi Internasional 2011 di Bali tanggal 9 s/d 2011 Mei 2011 	
15.27.	8-9 Mei 2011 9 s/d 12 Mei 2011	Makassar, Sulsel dan Bali	<ul style="list-style-type: none"> Menghadiri dan memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Gubernur seluruh Indonesia tanggal 8 s/d 9 Mei 2011 Menghadiri konferensi Internasional 2011 di Bali tanggal 9 s/d 2011 Mei 2011 	
16.24.	4-5 Mei 2011	Semarang, Jateng	Menghadiri dan sebagai narasumber pada Rapat Evaluasi Supervisi Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang	
25.	10-13 Mei 2011	Probolinggo dan Surabaya Jatim	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kunjungan kerja ke RSUD Waluyo dan pertemuan dengan Direktur RSUD Waluyo terkait lap dari Muhammad Nazaruddin mengenai adanya pungutan liar diluar biaya resmi) kepada pasien yang akan menjalani operasi Melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan 	
26.	4-9 Juni 2011	Wina, Austria	<ul style="list-style-type: none"> Menghadiri undangan dari International Ombudsman Institute (IOI) perihal “ 	

- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Centered
- Formatted: Space After: 0 pt
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Normal, Left, No bullets or numbering
- Formatted: Left
- Comment [AJI1]: Pemaparan tentang apa?
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Font: 11 pt
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Centered
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Normal, Left, No bullets or numbering
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Comment [AJI2]: Konferensi Internasional tentang apa?
- Formatted: Font: 11 pt
- Formatted: Centered
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Left, Indent: Left: 0,04 cm, Hanging: 0,02 cm
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Centered
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Centered

2. Jaringan Kerjasama dengan Instansi Lain

~~Pada periode Triwulan II 2011 Ombudsman Republik Indonesia telah Dalam rangka menjalin kerjasama dengan institusi/lembaga lain Ombudsman RI pada triwulan II ini telah dengan melakukan berbagai kegiatan antara lain-:~~

- ~~• Sebagai narasumber pada Rapat Evaluasi Supervisi Peningkatan Pelayanan yang diselenggarakan oleh KPK di Makassar Sulawesi Selatan;~~
- ~~• Sebagai narasumber pada Rapat Evaluasi Supervisi Peningkatan Pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang Jawa Tengah;~~
- ~~• Sebagai narasumber pada Seminar yang diselenggarakan oleh FH Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Ekasakti Padang;~~
- ~~• terlibat dalam berbagai kegiatan antara lain rapat koordinasi Gubernur se Indonesia di Makassar Sulawesi Selatan dan Rapat Evaluasi Supervisi Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, dalam hal ini sebagai narasumber-;~~
- ~~• Memberikan pemaparan pada rapat Gubernur seluruh Indonesia di Makassar Sulawesi Selatan-;~~
- ~~• Menghadiri konferensi Internasional di Bali yang diadakan oleh KPK.~~

Selain mengembangkan kerjasama di dalam negeri juga terlibat dalam kegiatan yang bersifat internasional yaitu ~~menghadiri Pelatihan dengan tema Sharpening Your Teeth Training yang diselenggarakan oleh International Ombudsman Institute (IOI) di Wina, Austria tanggal 4 s.d. 9 Juni 2011. perihal Sharpening Your Teeth Training.~~

3. Publikasi

~~Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia telah menerbitkan Laporan Tahunan 2010 pada triwulan kedua 2011. Laporan tersebut merupakan publikasi sekaligus sarana informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman selama tahun 2010 lalu.~~

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Normal

Formatted: Line spacing: Multiple 1,15 li, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0 cm + Indent at: 0,63 cm

Comment [AJI3]: Tentang?

Comment [AJI4]: Temanya apa? Bekerjasama dengan pihak mana? Kerjasama dalam rangka apa?

Comment [AJI5]: Konferensi tentang apa?

Comment [AJI6]: Pelatihan? Kursus? Konferensi?

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm

B. Penanganan Laporan Masyarakat

1. Akses Masyarakat

Akses masyarakat paling banyak disampaikan dalam bentuk surat berupa penyampaian laporan secara langsung kepada Ombudsman, maupun laporan yang tidak langsung disampaikan kepada Ombudsman. Jumlahnya mencapai 1061 surat sejak Januari 2011 hingga awal Juli 2011. Sedangkan akses melalui datang langsung sebanyak, 778 akses ke kantor Ombudsman baik di Jakarta maupun kantor-kantor perwakilan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Ombudsman tengah mengembangkan sistem manajemen arsip elektronik. Diharapkan pada masa mendatang seluruh dokumen terkait laporan/pengaduan masyarakat telah berbentuk elektronik dan memudahkan dalam penyelesaian laporan/pengaduan oleh Ombudsman.

Tabel 2. Jumlah Akses Masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia
Januari s.d. Juli 2011

Mekanisme	Jumlah
Surat	1061
Datang Langsung	778
Telepon	88
Website	110
Email	33
Media	26
Jumlah	2096

(data per tanggal 1 Juli 2011)

2. Data Pelapor

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 13 pt

Formatted: Indent: Hanging: 0,54

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Bold

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Bold

Formatted: Font: 10 pt

Formatted Table

Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm

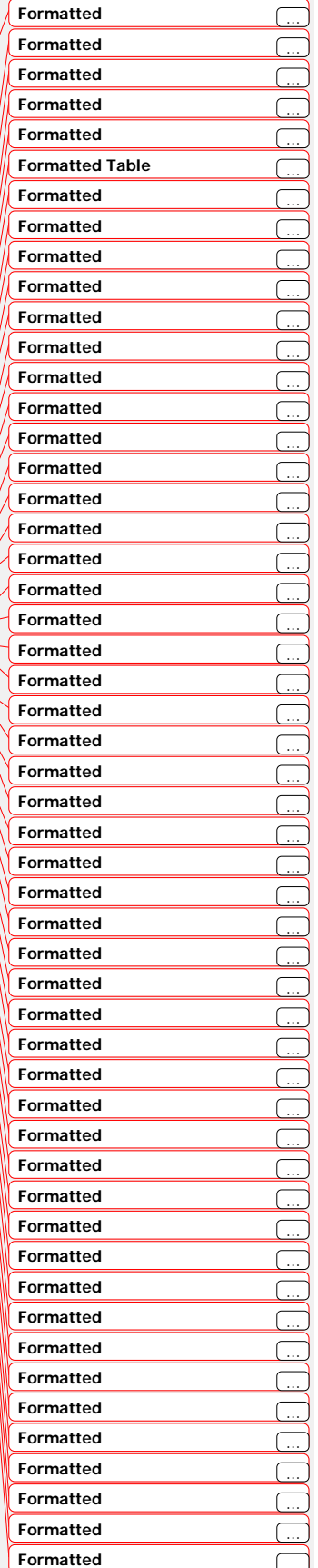
Formatted: Font: 11 pt

Klasifikasi masyarakat yang paling banyak melaporkan keluhannya tentang pelayanan publik kepada Ombudsman adalah Perorangan/Korban Langsung sebanyak 529 laporan (65,55%). Diikuti oleh Kuasa Hukum 96 laporan (11,90%), Lembaga Swadaya Masyarakat 48 laporan (5,95%), Kelompok Masyarakat 57 laporan (7,06%), dan Keluarga Korban 25 laporan (3,10%). Sedangkan laporan yang bersumber dari media dan merupakan Prakarsa Ombudsman (*own-motion investigation*) adalah 32 laporan (3,97%).

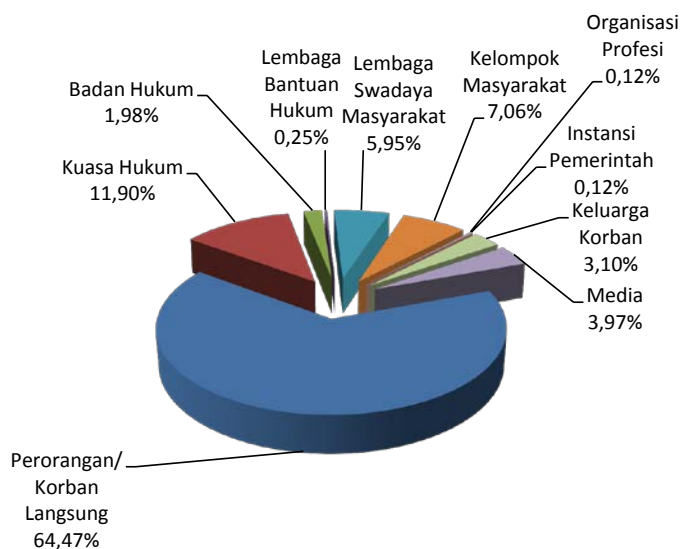
Tabel 3. Jumlah Laporan Masyarakat berdasarkan Klasifikasi Pelapor

Klasifikasi Pelapor	Jumlah	%
Perorangan/Korban Langsung	529	65,55%
Kuasa Hukum	96	11,90%
Badan Hukum	16	1,98%
Lembaga Bantuan Hukum	2	0,25%
Lembaga Swadaya Masyarakat	48	5,95%
Kelompok Masyarakat	57	7,06%
Organisasi Profesi	1	0,12%
Instansi Pemerintah	1	0,12%
Keluarga Korban	25	3,10%
Media	32	3,97%
JUMLAH	807	100,00%

(data per tanggal 1 Juli 2011)



Persentase Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor Januari-Juni 2011



(data per 1 Juli 2011)

Jumlah laporan terbanyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta yaitu 164 laporan (20,32%). Diikuti oleh Jawa Barat 112 laporan (13,88%) sebanyak Sumatera Utara 89 laporan (11,03%), Nusa Tenggara Timur 82 laporan (10,16%), Provinsi Jawa Timur 80 laporan (9,91%), Jawa Tengah 71 laporan (8,80%), Kalimantan Barat 25 (3,10%) dan Sulawesi Utara 16 laporan (1,98%). Daerah-daerah tersebut pada umumnya merupakan lokasi dimana terdapat kantor Ombudsman dan Ombudsman Perwakilan.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Font: 10 pt

Tabel 4. Jumlah Laporan Masyarakat berdasarkan Provinsi Asal Pelapor

3. Data Terlapor

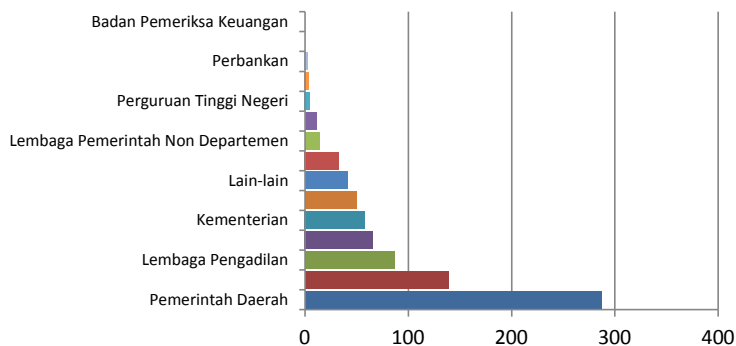
Instansi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah yaitu 290 laporan (35,94%). Fakta ini menunjukkan kesamaan dengan laporan masyarakat kepada Ombudsman pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan instansi lainnya yang juga banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Lembaga Pengadilan 87 laporan (10,78%), Kepolisian 140 laporan (17,35%), Instansi Pemerintah/Kementerian 60 laporan (7,43%), serta Badan Pertanahan Nasional 67 laporan (8,30%).

Tabel 5. Jumlah Laporan Masyarakat berdasarkan Klasifikasi Terlapor

INSTANSI	Jumlah	%
Pemerintah Daerah	290	35,94%
Kepolisian	140	17,35%
Lembaga Pengadilan	87	10,78%
Badan Pertanahan Nasional	67	8,30%
Kementerian	60	7,43%
BUMN/BUMD	50	6,20%
Lain-lain	43	5,33%
Kejaksaan	33	4,09%
Lembaga Pemerintah Non Departemen	14	1,73%
TNI	11	1,36%
Perguruan Tinggi Negeri	5	0,62%
Komisi Negara	4	0,50%
Perbankan	3	0,37%
DPR	0	0,00%
Badan Pemeriksa Keuangan	0	0,00%
JUMLAH	807	100,00%

-data per tanggal 1 Juli 2011-

**Grafik Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor
Januari-Juni 2011**



4. Substansi Maladministrasi

Substansi maladministrasi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah penundaan pelayanan oleh penyelenggara negara, misalnya perizinan yang tidak kunjung dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, masalah sertifikat tanah yang tidak kunjung dilayani oleh kantor pertanahan, eksekusi putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan, tidak adanya perkembangan lebih lanjut penyidikan oleh pihak kepolisian, dan sebagainya. Substansi maladministrasi Penundaan Berlarut tersebut mencapai jumlah 349 laporan (43,25%), diikuti Penyalahgunaan Wewenang 137 laporan (16,98%), Berpihak 81 laporan (10,04%), Penyimpangan Prosedur 60 laporan (7,43%), Permintaan Uang, Barang & Jasa 50 laporan (6,20%), Tidak Memberikan Pelayanan 66 laporan (8,18%), dan Tidak Kompeten 36 laporan (4,46%).

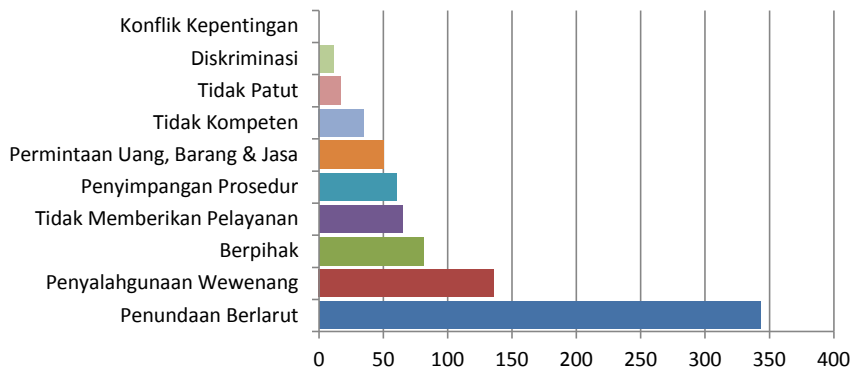
Tabel 6. Jumlah Laporan Masyarakat berdasarkan Substansi Maladministrasi

Substansi Maladministrasi	JUMLAH	%
Penundaan Berlarut	349	43,25%
Penyalahgunaan Wewenang	137	16,98%
Berpihak	81	10,04%
Tidak Memberikan Pelayanan	66	8,18%

Penyimpangan Prosedur	60	7,43%
Permintaan Uang, Barang & Jasa	50	6,20%
Tidak Kompeten	36	4,46%
Tidak Patut	17	2,11%
Diskriminasi	11	1,36%
Konflik Kepentingan	0	0,00%
JUMLAH	807	100,00%

(data per tanggal 1 Juli 2011)

Grafik Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Maladministrasi Januari-Juni 2011



5. Tindak Lanjut Ombudsman

Sejak Januari hingga Juni 2011 Ombudsman telah menindaklanjuti sebanyak 590 laporan/pengaduan masyarakat. Laporan tersebut tidak hanya yang diterima pada tahun 2011, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan/pengaduan masyarakat yang masih dalam proses adalah sebanyak 63,73% dari seluruh laporan yang diterima tahun 2011. Angka ini pada dasarnya menunjukkan bahwa Ombudsman sangat memerlukan tambahan sumber daya manusia untuk mempercepat penyelesaian penanganan laporan/pengaduan masyarakat.

Tabel 7. Jumlah Tindak Lanjut Laporan oleh Ombudsman Republik Indonesia

Bentuk Tindak Lanjut	2011	2010	2009	2008	Jumlah
Klarifikasi	375	71	6	0	452
Rekomendasi	5	3	3	0	11
Pemeriksaan Lanjutan	13	34	10	1	58
Bukan Wewenang	44	18	3	0	65
Melengkapi Data	45	11	1	0	57
Pemberitahuan	111	41	3	0	155
Lain-lain	1	0	0	0	1
JUMLAH	594	178	26	1	799

(data per tanggal 1 Juli 2011)

6. Tanggapan Terlapor

Jumlah tanggapan terlapor atas tindak lanjut Ombudsman sejak Januari hingga Juni 2011 sebanyak 295 surat, terdiri atas 216 surat menanggapi laporan tahun 2011, 71 surat menanggapi laporan tahun 2010, 8 surat menanggapi laporan tahun 2009, dan 1 surat menanggapi laporan tahun 2008.

Tabel 8. Jumlah Tanggapan Terlapor atas Tindak Lanjut Ombudsman

Substansi Tanggapan	2011	2010	2009	2008	Jumlah
Melakukan Penelitian	1	0	0	0	1
Menindaklanjuti Laporan	30	0	0	0	30
Penjelasan	185	71	8	1	264
Respon Instansi Terkait	0	0	0	0	0
Selesai Menurut Pelapor	0	0	0	0	0
JUMLAH	216	71	8	1	295

(data per tanggal 1 Juli 2011)

7. Investigasi

Sejak Januari hingga Juni 2011 Ombudsman telah melakukan 45 kegiatan investigasi terkait laporan/pengaduan masyarakat atau investigasi atas prakarsa sendiri (*own-motion investigation*). Diantara investigasi tersebut ada beberapa investigasi yang merupakan prioritas untuk diselesaikan dalam waktu dekat, antara lain investigasi pelayanan oleh kecamatan di DKI Jakarta

dan pelayanan perizinan satu atap oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi. Hasil investigasi yang merupakan prioritas tersebut dapat dilihat pada lampiran bahan Rapat Dengar Pendapat lainnya.

Kegiatan investigasi yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak Januari hingga Juni 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kegiatan Investigasi Tahun 2011

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Instansi Terlapor
1.	Investigasi lapangan kasus pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang terkait permohonan pengurangan PBB tahun 2009 dan 2010 yang dipersulit.	12 Januari 2011	Kantor Pelayanan Pajak Magelang
2.	Investigasi kasus pengerahan anggota Satpol PP Kabupaten Bantul dalam proses persidangan perusakan kantor LOS-DIY.	1 Februari 2011	Kantor Bupati Bantul
3.	Investigasi dugaan Penundaan Berlarut atas penundaan Pengiriman berkas kembali ke Kejaksaan Negeri Medan	14 Februari 2011	Kepolisian Sektor Medan Baru, Sumatera Utara
4.	Investigasi tentang pelanggaran prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan uang oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua	15-18 Februari 2011	Kepolisian Resor Atambua Pengadilan Negeri Atambua
5.	Investigasi dugaan penghilangan pertinggal arsip berkas Surat Pernyataan Ahli Waris	16 Februari 2011	Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara
6.	Investigasi terkait kasus pembunuhan orang tua salah satu Asisten Ombudsman di Nias Selatan	7-11 Februari 2011	Kepolisian Resort Nias Selatan
7.	Investigasi terkait belum dilaksanakan putusan Mahkamah Agung RI oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	7-11 Februari 2011	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

- Formatted: Font: 11 pt
- Formatted: Indent: Left: 0 cm
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Centered
- Formatted: Font: 10 pt, Bold
- Formatted: Centered, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted Table
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left

8.	Investigasi terkait keluhan atas kinerja Polres Pontianak dan Kantor Bupati Kubu Raya	8-11 Februari 2011	Kepolisian Resort Pontianak dan Bupati Kubu Raya
9.	Investigasi penanganan dugaan pemalsuan tanda tangan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara	8-11 Februari 2011	Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
10.	Investigasi terkait penundaan berlarut oleh Kepolisian Resort Bitung c.q. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara tentang tindak pidana pembunuhan	8-11 Februari 2011	Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
11.	Investigasi tindak lanjut sertifikat yang dimohonkan pada Badan Pertanahan Kota Manado yang tidak sesuai dengan prosedur	8-11 Februari 2011	Kantor Badan Pertanahan Kota Manado
12.	Investigasi dugaan penundaan berlarut atas penindakan Kepala Lingkungan VIII	18 Februari 2011	Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara
13.	Investigasi pelayanan RSUD Waluyo Jatim terkait pungli kepada pasien	21-24 Februari 2011	RSUD Waluyo Probolinggo Jawa Timur
14.	Investigasi terkait permohonan pensiun yang dipercepat	21-24 Februari 2011	Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Anggaran Jawa Timur
15.	Investigasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan tanah	21-24 Februari 2011	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
16.	Investigasi sengketa tanah dengan Pemerintah Kabupaten Ngada terkait status kepemilikan tanah di Kecamatan Golewa	23-26 Februari 2011	Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur
17.	Investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan tersangka	28 Februari 2011	Kepolisian Sektor Medan Area, Sumatera Utara
18.	Investigasi dugaan penundaan berlarut terhadap penyelesaian sengketa tanah antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan perorangan	1 Maret 2011	Badan Pertanahan Kota Medan
19.	Investigasi terkait informasi masyarakat Petani Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang mengenai kasus dugaan maladministrasi penerimaan bantuan alat-alat pertanian dari Gubernur Jawa Timur oleh Dinas Pertanian Kota Malang	9-11 Maret 2011	Dinas Pertanian Kota Malang

- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left
- Formatted: Font: 10 pt
- Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt
- Formatted: Left

20.	Investigasi lapangan atas prakarsa sendiri terkait pelayanan pelabuhan Merak-Bakauheni	13-16 Maret 2011	a) Kantor Pelabuhan Indonesia II Cabang Bakauheni b) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung c) PT ASDP Cabang Bakauheni d) Ditlantas Polda Lampung
21.	Investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran Hukum	15 Maret 2011	Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat
22.	Investigasi terkait pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin oleh Bupati Pasuruan	15-16 Maret 2011	Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur
23.	Investigasi dugaan penundaan berlarut dan penyalahgunaan wewenang dan penyelesaian kasus antara pengurus yayasan	18 Maret 2011	Kejaksanaan Tinggi Sumatera Utara
24.	Investigasi tentang ganti rugi tanah dengan Pemkab Flores Timur terkait status kepemilikan tanah di lingkungan Gege, Kelurahan Puken Tobi Wangin Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur	21-24 Maret 2011	Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
25.	Investigasi inisiatif menindaklanjuti data tahanan yang disampaikan kepada Ombudsman	23 Maret 2011	Lapas Wanita Klas II A Medan
26.	Investigasi Sistemik Pelayanan Terpadu Satu Pintu Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	27 Maret 2011	Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
27.	Investigasi kasus CPNS TA 2009 Kabupaten Samosir	29 Maret 2011	Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara
28.	Investigasi dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 12 Banjarmasin, Kalimantan Selatan	30 Maret 2011	SMPN 12 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
29.	Investigasi Sistemik Pelayanan Terpadu Satu Pintu Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi	4 April 2011	Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
30.	Investigasi dugaan penundaan berlarut	6 April 2011	Kepolisian Resort

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Left

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left, Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Left

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Left

Formatted: Left

Kegiatan investigasi yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak Januari hingga Juni 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Kegiatan Monitoring Tahun 2011

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Instansi Terlapor
1.	Monitoring laporan permasalahan ijazah STKIP Catur Sakti Bantul yang dianggap tidak sah oleh Kopertis V DIY karena proses pembelajarannya tidak sesuai kaedah pendidikan.	20 Januari 2011	Kopertis V DIY
2.	Monitoring penyelesaian sisa pembayaran ganti rugi tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Surabaya	31 Januari 2 Februari 2011	Walikota Surabaya
3.	Monitoring status dan kondisi tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan	1 Februari 2011	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjung Gusta Medan
4.	Monitoring atas pelayanan hak berkunjung bagi keluarga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klaten	2 Februari 2011	Lembaga Pemasyarakatan Klaten
5.	Monitoring terkait penerimaan CPNS untuk formasi 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.	7-11 Februari 2011	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
6.	Monitoring kasus keberatan penggunaan dokumen kependudukan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Yogyakarta dalam proses persidangan PTUN Yogyakarta.	16 Februari 2011	Pemerintah kota Yogyakarta
7.	Monitoring kasus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan hak pensiun PNS Guru di Pemerintah Kab. Boyolali	17-18 Februari 2011	Pemerintah Kabupaten Boyolali
8.	Monitoring kasus pelaksanaan putusan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun tidak	1 Maret 2011	Ketua PTUN Semarang Panitera/Sekretaris PTUN Semarang

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Centered, Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted Table

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Space Before: 3 pt, After: 3 pt

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan dan Hak lain Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 18);
2. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2009 tentang Panitia Seleksi Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 15 ayat (1));
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 13 ayat 4);
4. Peraturan Ombudsman Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Pasal 41);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Syarat dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Pasal 12 ayat (3)).

Formatted: Space After: 0 pt

Sedangkan perangkat organik lainnya yang masih dalam proses penyusunan adalah:

Formatted: Indent: Left: 0 cm

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman, saat ini pembahasannya masih terus dilakukan oleh Tim Antar Kementerian di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman di Daerah, saat ini pembahasannya sudah diselesaikan oleh Tim Antar Kementerian di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan masih menunggu pengesahan oleh Presiden Republik Indonesia.

B. Jaringan Kerjasama Internasional

Formatted: Font: +Headings (Cambria), 13 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan lembaga Ombudsman internasional, pada tanggal 22-26 Maret 2011 lalu Ombudsman Republik Indonesia telah menghadiri undangan sebagai peserta dalam konferensi ke-26 Australian and Pacific Ombudsman Region (APOR) yang dilaksanakan di Taipei, Taiwan. Anggota Ombudsman Republik Indonesia yang hadir pada saat itu adalah M. Khoirul Anwar dan Kartini Istikomah. Undangan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa keberadaan Ombudsman Republik Indonesia semakin diakui oleh lembaga internasional dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Republik Indonesia.

IV. Kinerja Keuangan

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm

Keuangan Anggaran Tahun 2011

Formatted: Font: 13 pt

Tantangan Anggaran Tahun 2011 dan 2012

Formatted: Font: 13 pt

V. Penutup

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm,
Hanging: 1 cm

Pengembangan kelembagaan Ombudsman pada dasarnya harus terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk itu Ombudsman tetap memerlukan dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat sebagai pengguna layanan publik, instansi penyelenggara pelayanan publik dalam merespon tindak lanjut Ombudsman, serta pihak lain termasuk Dewan Perwakilan Rakyat sebagai mitra kerja Ombudsman dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik di Republik Indonesia.

Formatted: Font: 11 pt

Jakarta, 31 Juni 2011

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Space After: 0 pt

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Danang Girindrawardana
Ketua